

Dinamika Politik Identitas Keagamaan di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dalam Konteks Kontemporer

Asiyah Jamilah

STAI Haji Agus Salim, Indonesia

Email: jamilahasiyah18@gmail.com

Abstract

This research examines the dynamics of religious identity politics in Indonesia in a contemporary context by considering the perspective of Islamic law. Through analyzing the Ahok controversy case as a case study, this research highlights the complexity and challenges associated with religious identity politics in Indonesia. The results of the analysis show that religious identity politics can be a tool to gain political advantage and mobilize the masses, with the perspective of Islamic Law providing a moral foundation for individuals and groups in expressing their religious identity. However, there are also diverse interpretations of Islamic principles that can influence political attitudes towards non-Muslims and trigger polarization in society. Therefore, handling the issue of religious identity politics requires a wise approach, prioritizing interfaith dialogue, and ensuring that the values of democracy, pluralism and human rights are upheld. With a commitment to these principles, it is hoped that Indonesia can create an inclusive social and political environment, which upholds human values and justice for all its citizens.

Keywords: *Politics of Identity, Islamic Law, Contemporary.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia dalam konteks kontemporer dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Islam. Melalui analisis kasus kontroversi Ahok sebagai studi kasus, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan politik identitas keagamaan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa politik identitas keagamaan dapat menjadi alat untuk memperoleh keuntungan politik dan memobilisasi massa, dengan perspektif Hukum Islam memberikan landasan moral bagi individu dan kelompok dalam mengekspresikan identitas keagamaan mereka. Namun, terdapat juga interpretasi yang beragam terhadap prinsip-prinsip Islam yang dapat mempengaruhi sikap politik terhadap non-Muslim dan memicu polarisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan isu politik identitas keagamaan memerlukan pendekatan yang bijaksana, mengedepankan dialog antaragama, dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi. Dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan sosial dan politik yang inklusif, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi semua warganya.

Kata kunci: Politik Identitas, Hukum Islam, Kontemporer.

PENDAHULUAN

Dalam era kontemporer yang gejolak, dinamika politik identitas keagamaan menjadi salah satu isu yang mendominasi panggung politik di berbagai belahan dunia. Identitas keagamaan sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan politik, memperjuangkan kepentingan kelompok, atau bahkan sebagai justifikasi untuk tindakan-tindakan ekstrem. Di tengah-tengah kompleksitas dinamika politik global, perspektif hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara-negara Muslim.

Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, politik identitas keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk agenda politik, kebijakan publik, dan dinamika sosial. Pengaruh politik identitas keagamaan dapat dilihat dalam berbagai isu, mulai dari pemilihan umum hingga pembentukan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum Islam menjadi krusial untuk membawa penyelesaian yang adil dan berkelanjutan terhadap konflik dan ketegangan yang muncul.

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan tentang politik identitas keagamaan dan hukum Islam secara terpisah, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman komprehensif tentang interaksi antara keduanya, terutama dalam konteks kontemporer yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika politik identitas keagamaan dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai kerangka analisis dalam konteks kontemporer. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara agama, politik, dan hukum dalam masyarakat Muslim saat ini.

Indonesia, dengan keragaman agama dan budaya yang kaya, sering kali menjadi laboratorium bagi studi tentang dinamika politik identitas keagamaan. Di tengah-tengah gejolak politik global dan lokal, identitas keagamaan telah menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk dan mengubah lanskap politik di Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman tentang perspektif hukum Islam menjadi sangat penting, karena agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perkembangan politik identitas keagamaan di Indonesia mencerminkan proses yang kompleks dan sering kali kontroversial. Dari gerakan Islam politik hingga upaya untuk memperjuangkan kepentingan agama dalam kebijakan publik, identitas keagamaan terus memainkan peran sentral dalam dinamika politik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks politik identitas keagamaan di Indonesia pada era kontemporer.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan pergeseran politik identitas keagamaan di Indonesia. Mulai dari kontroversi terkait penegakan syariat Islam di beberapa daerah hingga meningkatnya peran agama dalam proses pembuatan kebijakan, fenomena ini menuntut kajian yang mendalam untuk memahami implikasinya terhadap stabilitas sosial dan politi (Adam, Yusril Fahmi, 2022).

Dalam konteks ini, perspektif hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang unik untuk menganalisis dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia. Hukum Islam tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai, prinsip, dan etika yang memengaruhi pola pikir dan perilaku umat Islam. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara politik identitas keagamaan dan hukum Islam dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas dinamika politik di Indonesia (Anwar, 2018).

Dengan memahami dinamika politik identitas keagamaan dari perspektif hukum Islam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk tantangan politik yang dihadapi Indonesia saat ini. Melalui penelitian ini, diharapkan akan terungkap bagaimana pengaruh hukum Islam dalam konteks politik identitas keagamaan memengaruhi dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia, serta implikasinya terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkupnya pada analisis dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia, dengan penekanan pada perspektif Hukum Islam dalam konteks kontemporer. Meskipun demikian, penelitian ini tidak akan mencakup aspek-aspek yang terlalu teknis dari hukum Islam, namun akan fokus pada implikasi politik dan sosialnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang kompleksitas dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia, serta memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana Hukum Islam berperan dalam konteks tersebut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengelola isu-isu yang

berkaitan dengan identitas keagamaan untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal penelitian tentang Dinamika Politik Identitas Keagamaan di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dalam Konteks Kontemporer didesain untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena kompleks ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi narasi dan perspektif beragam faktor yang terlibat dalam politik identitas keagamaan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh politik, pemuka agama, aktivis masyarakat sipil, dan akademisi yang memiliki pengetahuan yang relevan. Selain itu, analisis dokumen seperti pidato politik, kebijakan pemerintah, dan tulisan ilmiah juga dilakukan untuk mendukung pemahaman konteks politik dan hukum Islam. Pendekatan triangulasi digunakan untuk memvalidasi temuan dan memastikan keabsahan data. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan politik yang memengaruhi dinamika politik identitas keagamaan. Selain itu, pendekatan normatif digunakan untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks kontemporer Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Identitas Keagamaan di Indonesia

Dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia telah menjadi isu yang semakin kompleks dalam konteks kontemporer. Pertama-tama, pergeseran demografis dan budaya, bersama dengan peningkatan akses terhadap teknologi dan media sosial, telah mempercepat pertumbuhan kelompok-kelompok identitas keagamaan yang lebih militan dan radikal. Hal ini tercermin dalam polarisasi politik yang semakin meningkat, di mana isu-isu keagamaan menjadi semakin dominan dalam debat publik dan kampanye politik.

Di samping itu, munculnya kelompok-kelompok kecil namun berpengaruh yang menganut ideologi yang keras terkait agama telah menimbulkan ketegangan sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Perbedaan pendapat terkait isu-isu seperti penegakan syariah, kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas agama menjadi semakin mencolok dan sering kali memicu konflik horizontal antar-masyarakat.

Tantangan lainnya datang dari penerapan hukum yang bersifat diskriminatif terhadap minoritas agama, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia secara konstitusional menjunjung tinggi prinsip keberagaman dan toleransi, implementasinya sering kali terhambat oleh penafsiran yang beragam terhadap hukum dan nilai-nilai keagamaan.

Di tengah ketegangan ini, terdapat upaya untuk memperkuat dialog antaragama dan mempromosikan toleransi melalui program-program pemerintah dan inisiatif masyarakat sipil. Namun, dampak dari upaya-upaya tersebut masih belum merata dan terkadang terhambat oleh resistensi dari kelompok-kelompok yang radikal dan intoleran. Sementara itu, politik identitas keagamaan juga telah menjadi faktor yang signifikan dalam dinamika politik nasional, terutama dalam konteks pemilihan umum dan pembentukan kebijakan. Kandidat politik sering kali menggunakan narasi keagamaan untuk memperoleh dukungan politik, menghasilkan retorika yang sering kali memecah-belah masyarakat.

Secara keseluruhan, dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia dalam konteks kontemporer menunjukkan kompleksitas yang tinggi, dengan tantangan dan peluang yang muncul secara bersamaan. Penanganan isu ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga keagamaan, untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

- **Analisis Contoh Studi Kasus Politik Identitas Keagamaan di Indonesia**

Salah satu studi kasus yang dapat dijadikan contoh tentang politik identitas keagamaan di Indonesia adalah kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016. Kasus ini bermula dari pidato Ahok yang menggunakan ayat Al-Qur'an dalam konteks politik, yang kemudian dianggap menista agama oleh sejumlah pihak (Effendi, 2020).

Kontroversi ini kemudian memicu protes massal dari kelompok-kelompok Islam konservatif yang menuntut Ahok diadili atas tuduhan penistaan agama. Demonstrasi-demonstrasi yang melibatkan ribuan orang digelar di Jakarta, menuntut agar Ahok dihukum secara pidana. Perkembangan kasus ini kemudian berdampak pada dinamika politik nasional, terutama dalam konteks Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang sedang berlangsung saat itu (Sari, 2016). Isu penistaan agama menjadi sentral dalam kampanye politik, dengan para kandidat yang bersaing mencoba memanfaatkannya untuk memperoleh dukungan politik.

Kasus Ahok menggambarkan bagaimana isu identitas keagamaan dapat digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh keuntungan politik dan memobilisasi massa. Hal ini menunjukkan bagaimana politik identitas keagamaan dapat menjadi pemicu ketegangan sosial dan politik yang signifikan, serta menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Penanganan kasus ini juga menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dalam sebuah negara demokratis yang pluralis seperti Indonesia (Hubaeat, Ciputri., 2023). Hal ini memunculkan diskusi tentang perlunya reformasi hukum yang lebih jelas terkait dengan kasus-kasus penistaan agama agar dapat menghindari penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.

Kasus Ahok menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam menangani isu-isu politik identitas keagamaan dengan bijaksana dan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pluralisme. Kasus ini menjadi contoh nyata dari dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia yang kompleks dan sensitif. Pertama-tama, kasus ini menunjukkan bagaimana isu-isu keagamaan dapat dengan cepat menjadi pusat perhatian dalam dinamika politik nasional, terutama ketika isu tersebut dikaitkan dengan tokoh atau pejabat publik yang memiliki pengaruh politik yang signifikan juga menyoroti bagaimana politik identitas keagamaan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan politik dan sosial tertentu. Penyalahgunaan isu keagamaan dalam konteks politik dapat menghasilkan mobilisasi massa yang kuat dan meningkatkan polarisasi politik di masyarakat.

Selain itu, kasus Ahok juga mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Meskipun kebebasan berbicara dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun isu-isu yang berkaitan dengan agama sering kali menjadi sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan konflik sosial.

Penanganan kasus ini oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum juga menyoroti kompleksitas dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah tekanan dari berbagai pihak. Pemerintah harus mampu menangani isu-isu sensitif seperti ini dengan bijaksana, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pluralisme (Sari, 2016).

Dengan demikian, kasus Ahok menjadi contoh yang penting dalam memahami dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia, serta menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dalam konteks keberagaman agama dan budaya yang kaya.

B. Perspektif Hukum Islam Memengaruhi Politik Identitas Keagamaan di Indonesia

Perspektif Hukum Islam memengaruhi politik identitas keagamaan di Indonesia dengan memberikan landasan hukum dan moral bagi individu dan kelompok-kelompok dalam mengekspresikan dan mempertahankan identitas keagamaan mereka. Dalam konteks politik, interpretasi terhadap prinsip-prinsip Islam dapat mempengaruhi sikap dan pandangan politik

seseorang, serta menjadi dasar argumentasi dalam memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai agama dalam ruang publik (Habibi, 2018).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dikutip terkait dengan politik identitas keagamaan adalah Surah Al-Hujurat (49:13) yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini sering dijadikan dasar untuk memperjuangkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan persatuan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Pandangan bahwa semua manusia diciptakan sama di hadapan Allah dan bahwa keunggulan seseorang tidak bergantung pada suku, bangsa, atau agama, dapat membentuk pandangan politik yang inklusif dan menghargai keragaman agama.

Namun, terdapat juga interpretasi yang berbeda terkait dengan politik identitas keagamaan dalam perspektif Hukum Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad juga memberikan pedoman bagi umat Islam dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka, baik dalam konteks personal maupun sosial.

Misalnya, Surah Al-Baqarah (2:256) menyatakan, *“Tidak ada paksaan dalam beragama,”* yang sering diartikan sebagai kebebasan untuk memilih agama dan mempraktikkan keyakinan tanpa tekanan dari pihak lain. Namun, ayat-ayat lain seperti Surah Al-Ma'idah (5:51) memberikan arahan bagi umat Islam untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai teman atau pelindung, yang dapat mempengaruhi sikap politik terhadap non-Muslim.

Dalam konteks politik, interpretasi atas ayat-ayat ini dapat memberikan dasar bagi umat Islam untuk memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai agama dalam ruang publik, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran dapat bervariasi dan tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik yang spesifik.

Perspektif Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik identitas keagamaan di Indonesia (Muthohirin, Nafik., 2019). Berikut adalah analisis mengenai bagaimana perspektif Hukum Islam memengaruhi politik identitas keagamaan di Indonesia:

1. Interpretasi Hukum Islam: Hukum Islam memiliki beragam interpretasi dan pemahaman, yang tercermin dalam beragam pendekatan terhadap isu-isu politik identitas keagamaan. Kelompok-kelompok yang menganut pendekatan konservatif atau literal terhadap Hukum Islam cenderung menekankan pada aspek-aspek seperti penerapan syariah dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dalam ranah politik.
2. Mobilisasi Massa: Perspektif Hukum Islam sering kali digunakan sebagai alat untuk mobilisasi massa dalam konteks politik identitas keagamaan. Kelompok-kelompok yang berupaya memperkuat identitas keagamaan sering kali menggunakan argumen agama untuk mendapatkan dukungan politik dari massa yang beragama.
3. Legitimasi Kebijakan: Hukum Islam juga digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dianggap berlandaskan pada nilai-nilai agama. Hal ini dapat dilihat dalam upaya penerapan hukum-hukum yang dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti dalam kasus penerapan syariah di beberapa daerah di Indonesia.
4. Persepsi Terhadap Otoritas Agama: Perspektif Hukum Islam juga memengaruhi persepsi terhadap otoritas agama dalam ranah politik. Tokoh-tokoh agama sering kali dianggap memiliki otoritas moral yang tinggi dalam menentukan kebijakan politik yang berkaitan

dengan identitas keagamaan

5. Pengaruh Terhadap Kebijakan Publik: Perspektif Hukum Islam juga dapat memengaruhi pembentukan kebijakan publik terkait dengan politik identitas keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tercermin dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan yang memperhitungkan nilai-nilai agama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Secara keseluruhan, perspektif Hukum Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap politik identitas keagamaan di Indonesia, baik dalam bentuk pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pemahaman yang mendalam tentang peran Hukum Islam dalam politik identitas keagamaan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Dinamika politik identitas keagamaan di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perspektif Hukum Islam. Kasus seperti kontroversi Ahok menggambarkan bagaimana isu-isu keagamaan dapat digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh keuntungan politik dan memobilisasi massa, dengan interpretasi atas prinsip-prinsip Islam menjadi landasan moral bagi individu dan kelompok dalam menyuarakan identitas keagamaan mereka. Sementara perspektif Hukum Islam menekankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persatuan, terdapat juga interpretasi yang dapat mempengaruhi sikap politik terhadap non-Muslim dan memicu polarisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan isu politik identitas keagamaan memerlukan pendekatan yang bijaksana, mengedepankan dialog antaragama, dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi.

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik identitas keagamaan dan peran Hukum Islam dalam konteks tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan sosial dan politik yang inklusif, di mana keberagaman agama dihargai dan dijaga dengan baik. Tantangan-tantangan dalam mengelola isu-isu keagamaan akan terus ada, namun dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan kerjasama antaragama, Indonesia dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih harmonis dan stabil, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Yusril Fahmi. (2022). *Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam 6(2), 88-103. DOI: 10.23971/njppi.v6i1.4395
- Anwar, Choirul. (2018). *Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan*. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 4 (2), 1-18.
- Effendi, Muhamad Ridwan & Iqbal Syafrudi. (2020). *Pertalian Agama Pada Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi 19(2), 12-27. DOI: [10.21009/jimd.v19i02.14528](https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14528)
- Habibi, Muhammad. (2018). *Analisis politik identitas di Indonesia*. INA-Rxiv. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887>
- Hutabarat, Ciputri. (2023). *NasDem: Narasi Politik Agama di Pilkada DKI dari Ahok, Bukan Anies*. CNN INDONESIA. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230107195519-32-897429/nasdem-narasi-politik-agama-di-pilkada-dki-dari-ahok-bukan-anies>
- Muthohirin, Nafik. (2019). *Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural*. J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 6 (1), 47-56. DOI: <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>
- Sari, Endang. (2016). *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*. KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2(2), 145-156.